

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data Badan Pusat Statistik Indonesia tentang rata-rata pengeluaran dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia tahun 2010-2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut tentunya memberi dampak positif bagi perekonomian negara. Disisi lain, hal tersebut dapat membahayakan masyarakat jika pendapatan dan pengeluaran tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang cukup sehingga berakibat pada pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan.

Literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Di kehidupan sehari-hari, masyarakat akan dihadapkan terkait cara mengontrol pengeluaran agar terhindar dari konsumsi yang berlebih dan mengalokasikan pendapatan dengan perencanaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), literasi keuangan tidak hanya terkait dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, tetapi juga terkait dengan kebiasaan masyarakat soal keuangan. Tingkat literasi keuangan yang

dimiliki masyarakat juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masyarakat yang melek keuangan akan lebih mudah memahami sektor keuangan yang kemudian akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan untuk menunjang kesejahteraannya. Selain itu, masyarakat yang memiliki pemahaman tentang keuangan juga akan mampu melindungi diri dari potensi kerugian di sektor keuangan (OJK, 2016).

Literasi keuangan mencakup hampir semua aspek yang berafiliasi dengan penggunaan perencanaan serta pengeluaran uang, seperti pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan, penggunaan kartu kredit, tabungan, investasi, dan pendapatan. Oleh karena itu, muncul ide untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang belum menggunakan layanan keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Bank Indonesia, 2014). Literasi keuangan juga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah memandang melalui literasi keuangan, stabilitas sistem keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif dapat lebih mudah tercapai (OJK, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Lusardi dan Mitchell (2014) menyimpulkan bahwa literasi keuangan perlu dimiliki oleh masyarakat. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis kualitatif pada 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Swis. Studi tersebut menyatakan

bahwa literasi keuangan berpotensi menjadi navigator yang baik bagi masyarakat, terutama dalam kondisi krisis ekonomi.

Selain literasi keuangan, inklusi keuangan turut berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, semakin banyak masyarakat menggunakan produk, jasa dan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Secara sederhana, inklusi keuangan merupakan jumlah orang yang berinteraksi dan menggunakan lembaga atau jasa keuangan yang meliputi layanan perbankan dan layanan non-bank seperti asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Bank Indonesia (2014: 4) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai upaya untuk mengurangi hambatan agar masyarakat memperoleh manfaat layanan keuangan dari perbankan dan non-perbankan lainnya, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki akses dan dapat menggunakan layanan keuangan formal. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan juga membawa dampak langsung bagi masyarakat, seperti penurunan tingkat kemiskinan, terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan sosial, hingga mendukung ekspansi keuangan.

Banyak yang menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat membantu masyarakat dan perekonomian karena inklusi keuangan memiliki kemampuan untuk menciptakan eksternalitas positif. Intinya inklusi keuangan berasal dari peningkatan tabungan dan investasi, sehingga mendorong proses pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, inklusi keuangan

memberikan dasar untuk membangun kebiasaan menabung, terutama dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup dalam kondisi keterbatasan keuangan di sebagian besar hidupnya (Akyuwen dan Waskito, 2018: 7).

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia melalui Al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk termasuk dalam bidang keuangan. Melalui sumber hukum Islam, literasi dan inklusi keuangan yang telah ada dikembangkan lagi agar memenuhi prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti yang terdapat pada QS. Al-Isra' [17] ayat 29-30:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30)

Artinya: *“dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal (29). Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia Kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya (30).”*

Ayat diatas menjelaskan tentang pengelolaan keuangan, dimana Allah memerintahkan untuk bersikap ditengah-tengah dalam mengelola rezeki, tidak terlalu pelit yang digambarkan dengan orang yang tangannya terbelenggu dileher sehingga tidak pernah memberikan bantuan kepada orang lain dan tidak menghambur-hamburkan harta atau terlalu royal yang digambarkan dengan terlalu mengulurkan tangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan perilaku tersebut dengan mempelajari dan

mempraktikkan literasi keuangan syariah di kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan inklusi keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan.

Keuangan syariah di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dengan masyarakat muslim sebanyak 219.960.000 dari total jumlah penduduk, namun rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah membuat potensi menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan ruang lingkup keuangan syariah, khususnya optimalisasi promosi keuangan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap akses (inklusi) ke lembaga atau jasa keuangan syariah.

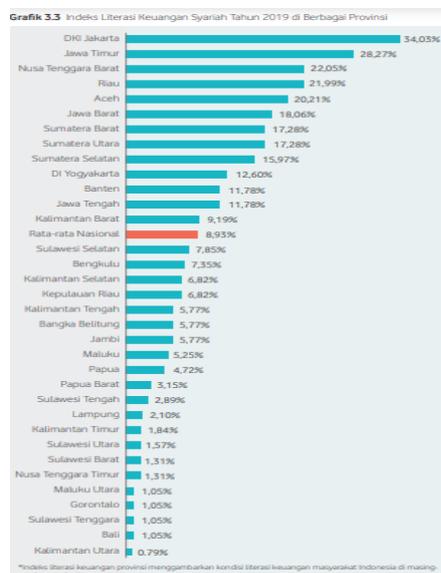
Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu indikator yang menjadi acuan tingkat pemahaman dan penggunaan/akses masyarakat Indonesia terhadap produk/layanan jasa keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah. Oleh karena itu, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan bauran strategi yang tepat guna mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia (SNLIK 2021-2025, hlm. 61).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Indonesia kedua yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah mencapai 8,93% dan tingkat inklusi keuangan syariah 9,10%. Angka tersebut secara bersamaan mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan hasil survei OJK 2016, yaitu tingkat literasi keuangan syariah 8,11% dan tingkat inklusi keuangan syariah 11,06%. Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan pemahaman (literasi) keuangan syariah masyarakat sebesar

0,82%, serta penurunan akses (inklusi) terhadap produk dan layanan keuangan syariah sebesar 1,96%. Artinya masih banyak kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap produk dan jasa serta lembaga keuangan syariah. Haddad (2017) menyatakan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah memberikan sinyal kepada para pemangku kepentingan bahwa industri jasa keuangan syariah masih jauh dari mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Masyarakat *well literate* dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial wellbeing*).

Lebih lanjut, SNLIK dalam survei kedua menyebutkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah, bahkan lebih rendah dari rata-rata indeks nasional yaitu 6,82% dan 5,25% dari rata-rata Nasional sebesar 8,93% dan 9,10%.

Tabel 1. 1
Grafik Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Nasional Tahun 2019



Sumber: SNLIK 2021-2025

Sangat disayangkan ketika mengetahui masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas masyarakat muslim ternyata masih banyak yang belum mendapatkan literasi keuangan yang mumpuni dan rendahnya adopsi terhadap lembaga atau layanan jasa keuangan syariah.

Jika OJK sebelumnya melakukan survei tentang literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat umum seluruh Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa terhadap masyarakat umum kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan sangat menarik untuk diteliti dikarenakan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibawah rata-rata nasional berdasarkan survei yang dilakukan di tahun 2016 dan 2019. Penulis memilih kota Banjarmasin karena alasan geografis dimana kota Banjarmasin merupakan kota dengan masyarakat terbanyak di Kalimantan Selatan. Selain itu, masyarakat kota Banjarmasin terkenal dengan religiusitas nya (Budiman dkk, 2018), cukup terbuka dengan hal-hal baru (*open minded*) dan memiliki karakteristik yang beragam sehingga tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah mungkin akan bervariasi. Disamping itu penulis ingin mengetahui apakah dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang tersedia di kota Banjarmasin secara efektif mendukung tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. dengan judul: ***“Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Masyarakat Kota Banjarmasin”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang membahas tentang literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin?
2. Apakah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemerintah Kota Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan OJK dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam

mengembangkan program literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalimantan Selatan khususnya kabupaten/kota Banjarmasin.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dan informasi terkait perkembangan literasi inklusi keuangan syariah saat ini khususnya di kota Banjarmasin.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang serupa.

E. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 38) definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini, definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Tingkat

Pengertian tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti linggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Tinggi rendahnya martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban, pangkat, derajat dan sebagainya). Tingkat yang

dimaksud pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan menurut peraturan OJK nomor 76/POJK.07/2016 adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dalam konteks syariah, hal tersebut harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Literasi keuangan syariah dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa indikator, diantaranya pengetahuan tentang keuangan pribadi, muamalah, Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS), industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) dan akses informasi. Pengukuran tingkat literasi keuangan syariah dalam penelitian ini menggunakan indikator Chen dan Volpe (1998) yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat literasi keuangan syariah tinggi (*well literate*) dengan persentase $\geq 80\%$, tingkat literasi keuangan syariah cukup/sedang (*sufficient literate*) dengan persentase 60-79%, dan tingkat literasi keuangan syariah rendah (*less literate*) dengan persentase $<60\%$.

3. Inklusi Keuangan Syariah

Menurut peraturan OJK nomor 76/POJK.07/2016, Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk,

dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tingkat inklusi keuangan syariah pada penelitian ini diambil dari sisi penggunaan faktual masyarakat sebagai konsumen dari produk dan jasa keuangan syariah (*demand side*) yang dibagi menjadi 3 kategori: 1) tingkat inklusi keuangan syariah tinggi dengan persentase $\geq 80\%$, tingkat inklusi keuangan syariah cukup/sedang dengan persentase 60-79%, dan tingkat inklusi keuangan syariah rendah dengan persentase $< 60\%$.

4. Masyarakat

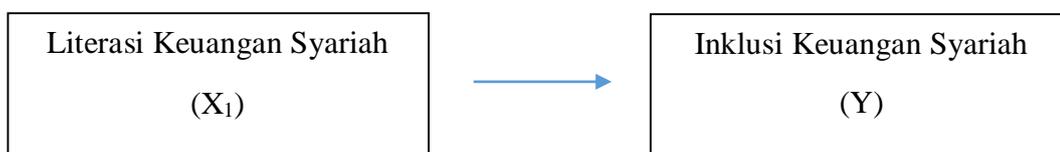
Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan di grup (Gandasari, Dyah, dkk. 2021). Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah kota Banjarmasin.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah diagram yang digunakan sebagai gambaran alur logis dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Dari diagram tersebut akan terlihat hubungan antar variabel.

Kerangka pemikiran ditulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian atau pertanyaan dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan sebagai penghubung antar konsep (Polancik, 2009). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1. 2
Kerangka Konsep



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep tersebut diatas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H₀ : Tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat kota Banjarmasin rendah.

H₁ : Tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat kota Banjarmasin tinggi.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh variabel literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin.

H₂ : Terdapat pengaruh variabel literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mochammad Arif Budiman, Mairijani, Mahyuni dan Herlinawati. Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Politeknik Negeri Banjarmasin. 2018. Dengan judul “Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Studi pada Politeknik Negeri Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Metode penelitian adalah penelitian survei. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif-deskriptif. Hasil penelitian menampilkan tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pegawai Poliban relatif cukup baik (77,4%), sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah (28,1%).
2. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati, dan Rahmaton Wahyu. Jurusan Perbankan Syariah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019. Dengan judul “Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi pada masyarakat Banda Aceh”. Penelitian ini menganalisis tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Banda Aceh dengan indikator penelitian meliputi: pengetahuan dasar keuangan syariah, asuransi syariah, tabungan dan pinjaman syariah serta investasi syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Banda Aceh

berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 71,99% (mengacu pada rumusan Chen dan Volpe (1998)).

3. Muhammad Ilham Akbar. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang. 2021. Dengan judul “Analisis Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Non Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang”. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif-komparatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner online (*Google Form*). Hasil Penelitian Menunjukkan tingkat literasi keuangan mahasiswa FEB dan Non FEB UMM berada pada kategori sedang yaitu 78%.
4. Albertis Hari Yudha Setiawan. Prodi Pendidikan Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2020. Dengan judul “Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2017”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat kecamatan Gondokusuman serta menganalisis hubungan antara literasi dan inklusi keuangan. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tabulasi silang. Hasil menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada kategori rendah yaitu 27%, tingkat inklusi keuangan

masyarakat berada pada kategori tinggi yaitu 83% dan literasi keuangan berhubungan positif dengan inklusi keuangan.

5. Amir Hamzah. Universitas Kuningan. 2019. Dengan judul “Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji indikator dari literasi dan inklusi keuangan syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial attitude*, *financial behavior*, dan *financial knowledge* berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat dilihat persamaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis, yaitu variabel yang digunakan adalah literasi dan inklusi keuangan syariah menggunakan metode survei menggunakan teknik analisis kuantitatif- deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terdapat pada objek yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sesuai dengan penulisan pedoman penulisan skripsi yang berisikan dalam 5 Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah dari penelitian yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan pada pokok permasalahan, maka

dibuatlah rumusan masalah dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat penelitian ini sendiri baik secara teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada paduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisikan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah dan beberapa teori-teori terkait seperti buku atau literatur dan juga sumber informasi dari referensi media lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan merupakan acuan untuk menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini terdiri dari jenis, pendekatan, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian yang memfokuskan pada teknis penulisannya, serta penelusuran objek dan subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN, atau laporan penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada masyarakat kota Banjarmasin. Sehingga akan memberikan analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan

pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan ditentukan beberapa saran yang dirasa perlu (Antasari, 2008).